



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERCEPATAN PERBAIKAN DATA DAN KETEPATSASARAN PENERIMA BANSOS

**Mohammad Teja**

Peneliti Ahli Muda

[teja@dpr.go.id](mailto:teja@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Terealisasinya anggaran 2021 Kementerian Sosial sebesar 97,42% atau Rp105.305.627.076.017 dari Rp108.093.553.130.000 mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021, dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022. Dalam rapat tersebut Menteri Sosial juga menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar RP 78.256.327.121.000 telah terealisasi sebanyak Rp40.243.939.732.411 atau 51,43%. Ini menunjukkan Kementerian Sosial berada pada peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05% per 4 Juni 2022. Mensos juga memastikan Kementerian Sosial akan terus menjaga dan memperkuat transparansi, akuntabilitas anggaran dan selalu mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Tidak hanya apresiasi, Menteri Sosial juga mendapat masukan penting dari Komisi VIII tentang bagaimana menjelaskan program-program yang telah dicapai menggunakan anggaran yang sangat besar tersebut sudah mengurangi atau mengentaskan masalah-masalah kemiskinan secara nyata. Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial diawali dengan seriusnya Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, terutama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan K/L lain dalam mengambil kebijakan. Kemensos juga diminta dalam setiap laporan pencapaian penggunaan anggaran disertai efektivitas penggunaan anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin atau bahkan mampu mengurangi/membantu masyarakat keluar dari kategori miskin.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan penyaluran bantuan sosial yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa periode 2021 yang ditemukan pada 26 pemerintah daerah (Pemda) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) semester II tahun yang sama. Masalah yang ditemukan antara lain BLT-DD kepada KPM yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, KPM BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima tidak tepat jumlah serta penyaluran yang terlambat dilaksanakan. Permasalahan lain yang terkait pada perencanaan dan penganggaran program perlinsos melalui BLT-DD seperti, KPM BLT-DD tidak sesuai ketentuan verifikasi dan validasi atas data KPM BLT-DD yang belum memadai, daftar KPM yang belum disahkan dan pemerintah desa tidak memublikasi daftar KPM BLT-DD kepada masyarakat. Temuan dan kerugian negara 6,93 T langsung ditindaklanjuti oleh Mensos, yang menurutnya itu laporan sementara dan sudah selesai dalam 5 hari. Persoalan perbaikan dan *update* data memang menjadi persoalan yang terus menjadi masalah dalam setiap program-program bantuan pemerintah. Pentingnya pembaruan data penerima manfaat agar program bantuan tepat sasaran dan terukur sangatlah mendesak.

## Atensi DPR

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi VIII melakukan pendampingan secara ketat untuk mengawasi penyaluran BLT dan program-program bantuan sosial lainnya sesuai kriteria dan hak Kelompok Penerima Manfaat. Mendorong pemerintah untuk serius dalam pengelolaan dan *update* data terhadap masyarakat dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan hak-haknya terhadap program bantuan pemerintah sesuai dengan amanat UU 13 tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) sampai (9) tentang Penanganan Fakir Miskin . Bersama Pemerintah, Komisi VIII mencari beberapa alternatif program yang dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya yang tercermin pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat penerima manfaat tersebut. Mendorong pemerintah (Menteri Sosial) untuk lebih serius dalam meng- *update* data KPM guna mengukur capaian keberhasilan bahkan kegagalan program-program bantuan sebagai dasar penentuan kebijakan/program yang akan dilaksanakan selanjutnya.

## Sumber

dpr.go.id, 7 Juni 2022;  
kemensos.go.id, 7 Juni 2022;  
kumparan.com, 6 Juni 2022;  
*Media Indonesia*, 6 Juni 2022;  
money.kompas.com, 25 Mei 2022;  
*Republika*, 6 Juni 2022.